



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

Radar Karawang

Karawang Diser...

SENIN 3 SEPTEMBER 2018



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

Desa Dijatah Dana Bagi Hasil Rp84 Miliar



Dana Bagi Hasil

| | |
|------------|------------------|
| Tahun 2017 | Rp40.704.425.000 |
| Tahun 2018 | Rp84.641.046.000 |

anggaran yang selalu naik setiap tahun. Selain besaran dana bantuan gubernur (Bangub) yang

Iya betul, Rp84 miliar.”

KEPALA DPMD
ADE SUDIANA

KARAWANG, RAKA - Pemerintah desa sangat dimanjakan dengan guyuran

► *Baca Desa.. Hal 7*

Desa Dijatah Dana Bagi Hasil Rp84 Miliar

naik signifikan dari Rp115 juta jadi Rp200 juta, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi Daerah (PRD) juga disebut-sebut mengalami hal serupa. Bahkan besaran yang diperkirakan sekitar Rp84 miliar, ada penambahan pos-pos tunjangan bagi kepala desa dan perangkatnya di luar penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Kasie Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang Andry Irawan mengatakan, peruntukan DBH hasil pajak dan retribusi daerah tahun ini tertuang dalam keputusan bupati Karawang Nomor 971.1/kep.476-huk/2018. Karena selain porsi yang sama bagi pekerja desa yang tidak tercover oleh ADD seperti upas, linmas, pemulasaraan jenazah hingga renovasi kantor desa di tahun sebelumnya, ada tambahan tunjangan yang dicover dalam DBH, yaitu untuk kepala desa Rp1 juta per orang

per bulan, dan juga kepada perangkat desa Rp500 ribu. "Penambahan anggaran harus bisa berpengaruh terhadap peningkatan kinerja aparat pemerintah desa," ungkap Andry kepada Radar Karawang.

Andry menambahkan, selain tunjangan, juga ada program pengadaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan standar pelayanan minimal desa, ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 untuk desa dengan besaran tertentu. "Pemerintah desa harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, utamanya untuk desa-desa dengan intensitas pelayanan publik yang tinggi," ujarnya.

Disinggung porsi buat para ketua RT, RW dan insentif pemungut PBB, Andry mengaku hal itu ada porsinya walaupun cukup dan tidak terlalu tinggi. "Cukuplah," ungkapnya tanpa merinci besarnya.

Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang Alex

Sukardi menuturkan, dana DBH diyakininya akan mengalami kenaikan karena bupati sudah menganggarkan 7,5 persen dari total pendapatan pajak dan retribusi Karawang, atau sekitar Rp80 miliar sampai Rp90 miliar dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp45 miliar. Adapun soal rincian pembagian anggaran DBH, masih tidak ada perbedaan jauh seperti insentif linmas, operator, pemungut pajak hingga operasional yang tidak tercover oleh ADD seperti tambahan kegiatan Perayaan Hari Besar Islam dan Perayaan Hari Besar Nasional, serta biaya pelatihan-pelatihan perangkat desa. "Diusulkan (kenaikan) Rp1,5 juta untuk kades dari DBH. Tapi saya tidak tahu berapa yang dikabulkannya," tuturnya.

Kepala DPMD Kabupaten Karawang Ade Sudiana mengatakan, besaran DBH tahun ini Rp84 miliar dan alokasinya sudah dirembukan dengan Apdesi. "Iya betul, Rp84 miliar," katanya. (rud)